

BAB V

PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan disajikan beberapa pembahasan sesuai dengan hasil penelitian serta teori yang telah disajikan pada bab sebelumnya. Disini peneliti melakukan wawancara oleh Ketua Direktur BUMDesma Besuki, Pengurus/pengelola BUMDesma Besuki, dan masyarakat anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP), serta dokumen-dokumen sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini. Berikut pembahasan dari data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi:

A. Pengelolaan BUMDesma Besuki dalam Peningkatan Usaha

Masyarakat Ekonomi Mikro.

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Besuki merupakan salah satu lembaga perekonomian yang pengelolaannya dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat kecil menengah. Selain itu, dengan adanya BUMDesma Besuki dapat membantu para masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan atau modal untuk usahanya. Hasil dari penelitian bahwa pengelolaan di BUMDesma Besuki seperti bekerjasama dengan memberi pinjaman modal kepada masyarakat. Kemudian BUMDesma juga memberikan pembinaan serta pengembangan usaha dan mengajarkan bagaimana cara mengembalikan pinjaman modal awal supaya tidak membebankan masyarakat yang meminjam modal.

BUMDesma Besuki menyediakan alat tulis kantor (ATK) online yang dimana untuk penyediaan keperluan kantor Desa yang ada di Kecamatan Besuki. BUMDesma Besuki ini membatasi usia peminjam dana dengan batasan minimal 17-55 tahun yang di khususkan hanya wanita saja, selain itu warga masyarakat kecamatan Besuki juga mendukung adanya Simpan Pinjam di BUMDesma Besuki dengan memberikan kemudahan untuk pinjaman dengan bunga yang rendah yaitu sebesar 1,5%.

Oleh dari itu dapat dikatankan bahwa BUMDesma Besuki ini menganut beberapa prinsip dalam pengelolaan BUMDes, yang meliputi: a) *Kooperatif* semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya, b) *Partisipatif* semua komponen yang terlibat didalam BUMdes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes, c) *Emansipatif* semua kompenen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan,suku, dan agama, d) *Transparan* aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka, e) *Akuntabel* seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrasi, f) *Sustainable* kegiatan usaha harus dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.¹¹⁸

¹¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2007), hlm. 13

Selain itu juga pengelolaan BUMDesma Besuki selaras dengan skripsi yang ditulis oleh Garnies Lelyana Sagita bahwa dalam pengelolaan di BUMDes Tirta Mandiri sama-sama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi meraka. Disamping itu, keberadaan BUMDes juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.¹¹⁹

B. Peran BUMDesma dalam Implementasi Program Simpan Pinjam

Perempuan (SPP).

Dari wawancara di atas bahwa peran BUMDesma Besuki dalam program Implementasi SPP ini sangat cukup baik, yaitu dengan di lakukan adanya Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan dengan memberikan pendanaan atau modal Usaha perekonomian serta melakukan kegiatan sosialisasi seperti kegiatan penyuluhan tentang wirausaha yang mana tujuannya untuk memotivasi khususnya warga Kecamatan Besuki supaya tergerak hatinya untuk melatih keterampilan atau skill sesuai dengan keahlian itu masing-masing. Yang mana semua itu guna untuk mengangkat perekonomian masyarakat serta menyejahterakan masyarakat dan pengurangan pengangguran.

¹¹⁹ Garnies Lelyana Sagita, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus BUMdes Tirta Mandiri Klaten)*, (Surakarta:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017).

Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kepengurusan BUMDesma Besuki ini yakni antara lain, diantaranya Pengurus BKAD BUMDesma Besuki, Pengelola Pelaksana (Direksi) BUMDesma Besuki, Badan Pengawas BUMDesma Besuki, Tim Verifikasi Perguliran SPP. Dari masing masing anggota SPP ini terdapat terbentuknya kelompok desa, kebanyakan yang diikuti oleh ibu ibu arisan dan ibu PKK. Dari masing masing desa harus dapat terbentuknya kelompok Simpan Pinjam Perempuan dengan minimal 5 dan maksimal 12 Kelompok.

Maka dari itu Implementasinya yaitu dilakukan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) untuk mengadakan pendirian atau pembentukan BUMDesma (Badan Usaha Milik Desa Bersama) di tingkat kecamatan atau kawasan perdesaan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah antar desa tentang pengalihan aset tersebut akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan BUMDesma melalui peraturan bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesma.

Karena itu dapat dikatakan bahwa peran penting dari BUMDesma Besuki meliputi : a) membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat, b) memperkuat perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, c) mengembangkan potensi dan kemampuan wirausaha ekonomi masyarakat desa yang mana pada umumnya bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Hal tersebut sama atau sesuai dengan salah satu peran BUMDes yang terdapat pada teori dalam buku Seyadi tentang peranan BUMDes terhadap peningkatan perekonomian desa sebagai berikut :¹²⁰

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.
- d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e) Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Sama halnya dengan penelitian terdahulu dari Satika Rani dengan judul Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa BUMDes Karya Abadi di Desa Karya Mulya Sari sudah cukup berperan dan berkontribusi bagimasyarakat hanya saja belum dapat dikatakan maksimal, yakni masih

¹²⁰ Seyadi, *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*, (Yogyakarta : UPP STM YKPN, 2003), hlm. 16.

adanya ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat di Desa Karya Mulya Sari.¹²¹

C. Ketentuan Mekanisme dari kegiatan Simpan Pinjam Perempuan

Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program simpan pinjam kelompok perempuan ini adalah kegiatan yang direncanakan oleh sebuah lembaga Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP).

BUMDesma Besuki terdapat ada beberapa ketentuan mekanisme atau proses yang dilakukan sebagai anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini ada 4 tahapan yaitu: (1) Pengajuan Proposal, (2) Proses verifikasi, (3) Rapat pendanaan, (4) Pencairan dana. Adapun 9 persyaratan yang harus dilakukan oleh si peminjam modal yaitu: (1) harus ada Profil Kelompok, (2) Daftar calon pemanfaatan dan perguliran, (3) Rencana Angsuran kredit kelompok. (4) RUK (Rencana Usaha Kelompok), (5) Persyaratan kesediaan tanggung renteng dari seluruh anggota, (6) Foto copy KTP anggota kelompok + KTP Suami/ Anggota Keluarga sebagai pihak penanggung, (7) Surat persetujuan Suami/ Keluarga dari anggota kelompok, (8) Berita acara Musyawarah Kelompok (lengkap dengan daftar hadir dan notulen), (9) Foto copy bukti tabungan kelompok di Bank (jika ada).

¹²¹ Satika Rani, *Peran dan Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada BUMDES Karya Abadi di Desa Mulya Sari Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018).

Dari pengertian simpan pinjam yang telah dijelaskan Adapun yang menjadi tujuan dan ketentuan dasarnya yaitu sebagai berikut:¹²²

d. Tujuan umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan penanggulangan rumah tangga miskin.

e. Tujuan khusus

Adapun yang menjadi tujuan khusus pada kegiatan ini adalah :

- 4) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- 5) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
- 6) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

f. Ketentuan dasar

- 1) Kemudahan, artinya masyarakat miskin dengan mudah dan cepat mendapatkan pelayanan pendanaan kebutuhan tanpa syarat agunan.
- 2) Terlembagaan, artinya dana kegiatan SPP disalurkan melalui kelompok yang sudah mempunyai tata cara dan prosedur yang sudah baku dalam pengelolaan simpanan dan pengelolaan pinjaman.

¹²² 1M. Iqbal Tuasikal, *Integrasi PNPM Mandiri dalam Pembangunan Desa*, (Langkat: Fasilitator Kabupaten: PNPM-MP, 2012), hlm 12.

- 3) Keberdayaan, artinya proses pengelolaan didasari oleh keputusan yang professional oleh kaum perempuan dengan mempertimbangkan pelestarian dan pengembangan dana bergulir guna meningkatkan kesejahteraan.
- 4) Pengembangan, artinya setiap keputusan pendanaan harus berorientasi kepada peningkatan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan efektifitas ekonomi masyarakat pedesaan.
- 5) Akuntabilitas, artinya dalam melakukan pengelolaan dana bergulir tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.¹²³

Sama halnya dengan penelitian terdahulu skripsi yang di tulis oleh Irma Yani, yang berjudul Implementasi program Simpan Pinjam kelompok perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam bahwa adanya program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) menjadikan masyarakat sejahtera, di Desa Pematang tengah Kecamatan Tanjung Pura bahwa terdapat peningkatan pendapatan dilihat dari terpenuhinya kebutuhan pokok dalam keluarga dan masyarakat merasa terbantu dalam segi modal maupun segi sosial kemasyarakatan seperti adanya saling kepedulian terhadap sesama masyarakat melalui kelompok-kelompok yang telah dijalankan.¹²⁴

¹²³ *Ibid.*,14

¹²⁴ Irma Yani, *Implementasi Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Desa Pematang Tengah Kecamatan Tanjung Pura*, (Skripsi: Tidak di terbitkan 2018)

D. Faktor penghambat Internal dan Eksternal BUMDesma Besuki dalam peningkatan ekonomi masyarakat.

Dalam mewujudkan tujuan secara keseluruhan tentunya banyak kendala yang di hadapi BUMDesma Besuki dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Kendala tersebut tentunya sangat menghambat dalam upaya peran BUMDesma dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Besuki. Bapak Agung Ari Wibowo S.Pd Utama di BUMDesma Besuki peningatakan bahwa tidak mudah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dilihat masih adanya kendala yang terjadi baik kendala internal maupun eksternal.

1. Kendala Internal:

- a. Terbatasnya Tenaga Kerja Terbatasnya tenaga kerja karena pihak BUMDesma jika ingin mengangkat karyawan baru harus adanya persetujuan-persetujuan terlebih dahulu. Maka hanya 3 (tiga) orang saja yang bekerja penuh di kantor BUMDesma Besuki dan mengatasi 1 (satu) kecamatan. Karena dengan penambahan karyawan maka akan semakin banyak pengeluaran serta akan adanya pembengkakan dalam sistem operasional dan bisa menghambat kelangsungan jalannya BUMDesma untuk kedepannya. Maka dari itu, 1 (satu) karyawan bisa mengatasi 2 (dua) atau 3 (tiga) pekerjaan unitunitnya, sehingga para karyawan tidak bisa fokus dalam mengatasi pekerjaannya.

Mengenai hal tersebut sama dengan jurnal dari Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. yang berjudul “ Pengembangan Desa Mandiri

Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” bahwa terdapat kendala seperti keterbatasan Sumber daya manusia yang mengelola dan mengembangkan BUMDes. Masih banyak pengurus BUMDes yang rangkap jabatan dengan lembaga lainnya, sehingga pengurus lebih fokus ke pekerjaan utamanya dari pada fokus ke BUMDes.¹²⁵

b. Kurangnya peralatan kerja

Terbatasnya peralatan kerja seperti adanya komputer, mesin Print, dan terlalu sempitnya ruang bekerja juga dapat menjadi kendala internal. Jadi para karyawan kantor BUMDesma harus bergantian dalam menggunakan alat-alat yang ada di kantor tersebut serta harus merasakan pengap karena ruang kantor yang terlalu sempit.

Mengenai hal tersebut sama dengan jurnal penelitian dari Muhammad Bahrul Rizki yang berjudul “ Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur bahwa dalam pengembangan usaha kebun singkong gajah adalah belum tersedia mesin pengering tepung. Untuk saat ini proses pengeringan hasil produksi masih mengandalkan terik matahari.¹²⁶

2. Kendala Eksternal

¹²⁵Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushantono, Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 13, No. 1 Maret 2016, hlm. 75

¹²⁶Edy Yusuf Agunggunanto, Fitrie Arianti, Edi Wibowo Kushantono, Darwanto, *Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Universitas Diponegoro Semarang, Vol. 13, No. 1 Maret 2016, hlm. 56

- a. Kesadaran masyarakat pentingnya unit-unit di BUMDesma Ada beberapa masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan terhadap manfaat adanya BUMDesma, mereka tidak mempunyai kesadaran bahwa dengan adanya BUMDesma kecamatan Besuki ini dapat membantu meningkatkan Ekonomi masyarakat dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga dapat bisa mendirikan usaha Ekonomi Mikro.
- b. Sikap dan Ketertarikan Masyarakat terhadap BUMDesma Masyarakat cenderung tidak mau tau tentang apa itu BUMDesma, menyepelekan keberadaan BUMDesma. Terkadang masyarakat tidak terbuka hatinya untuk tertarik bekerjasama dengan BUMDesma Besuki mereka takut jika nantinya hanya akan dimanfaatkan oleh BUMDesma untuk keberhasilan pihak BUMDesma itu sendiri.
- c. Kendala pada unit usaha simpan pinjam Dalam unit simpan pinjam juga terdapat kendala yaitu terjadinya tunggakan seperti tunggakan macet pada per April 2020 koleabilitas II s/d V angsuran pokok menunggak lebih 6 kali angsuran, tunggakan yang tidak bisa dikendalikan, dan tunggakan yang memang benar-benar parah, yang menyebabkan karena usaha tidak lancar, penyalah gunaan oleh anggota atau kelompok yang tidak bertanggung jawab serta adanya penghambat usaha adanya Covid19. Contohnya dari anggota sudah dibayarkan ke ketua kelompok,

Adapun tindak lanjut yang dilakukan BUMDesma Besuki dalam mengatasi penunggakan tersebut adalah

- 1) Mengkonfirmasi kepada pengurus kelompok untuk penanganan masalah tunggakan secara lebih intensif,
- 2) Mensosialisasikan kepada semua kelompok terkait jatuh tempo daripada seperti biasanya,
- 3) Tim kecamatan berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa terkait permasalahan tunggakan tersebut agar bisa segera teratasi,
- 4) Dibentuk Tim Penanganan Masalah untuk pencapaian progres yang lebih baik,
- 5) Melakukan penagihan bersama Tim Penanganan Masalah kepada peminjam yang menunggak,
- 6) Menindaklanjuti progres penyelesaian tunggakan jika tidak bisa kunjung selesai untuk dilakukan proses yang lebih lanjut,
- 7) Dilakukan klasifikasi diantara kelompok-kelompok yang bermasalah sehingga bisa dilakukan penanganan yang berbeda pula agar ada hasil yang lebih efektif,
- 8) Sudah diberikan surat peringatan kepada kelompok, dan surat sudah melalui tembusan Camat, Kapolsek dan Kepala Desa terkait,
- 9) Melibatkan pihak berwajib dalam hal ini adalah babinkamtibmas Desa dalam rangka proses koordinasi penanganan masalah.¹²⁷

¹²⁷Buku Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hlm 75.

Dalam penyelesaian kendala yang menjadi penghambat dalam peningkatan perekonomian masyarakat BUMDesma Besuki telah menyusun strategi dalam mengatasi kendala tersebut yaitu:

1. Solusi Internal

- a) Dengan kendala yang terjadi BUMDesma Besuki mempunyai solusi untuk mengatasi kendala tentang masalah terbatasnya tenaga kerja yaitu akan menambah tenaga kerja yang profesional tetapi juga dengan cara hitung-hitungan terlebih dahulu, serta memastikan terlebih dahulu jika dengan menambah karyawan BUMDesma Besuki tidak akan terhambat dalam sistem operasionalnya, sehingga kedepannya BUMDesma tetap akan berkembang. Maka dari itu, untuk saat ini BUMDesma Besuki memilih 3 (tiga) orang saja yang menjadi Pengelola atau Pelaksana Direksi di BUMDesma Besuki dan harus mengatasi 1 (satu) kecamatan.
- b) Dalam mengatasi kendala kurangnya peralatan kerja yaitu BUMDesma Besuki nantinya akan membeli peralatan kerja sesuai dengan yang di butuhkan untuk fasilitas kerja. Kemudian nantinya juga akan dibangun kembali kantor BUMDesma yang lebih luas, supaya para karyawan yang bekerja dikantor akan lebih merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya.

Hal ini selaras dengan jurnal dari Edy Yusuf Agunggunanto, dkk. yang berjudul “ Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)” bahwa terdapat kesamaan dalam

mengatasi masalah kendala tentang keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes. Cara mengatasinya yaitu dengan mencari pengurus yang profesional dalam mengurus kegiatan BUMDes. Pengurus yang dibutuhkan adalah orang-orang yang berkopeten serta memiliki wawasan yang luas untuk motivasi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes.¹²⁸

2. Solusi Eksternal

- a. Dari mengatasi kendala kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya unit-unit usaha di BUMDesma Besuki dalam memberikan motivasi atau pembinaan serta pendampingan masyarakat akan kesadarannya potensi Usaha Mikro yang dikembangkan yaitu dengan memberikan pendampingan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, karena dengan cara melakukan pendampingan pelatihan maka akan terlihat potensi-potensi apa yang di miliki oleh masyarakat Besuki, kemudian dilakukan pendampingan pembinaan yang bertujuan untuk membina masyarakat supaya usaha yang dikelola akan lebih maju dan mencapai target yang di inginkan. Jadi hal ini juga dapat menjadi daya tarik masyarakat agar lebih tertarik untuk bekerja sama dengan BUMDesma Besuki sesuai dengan skill yang dimiliki oleh masyarakat khusus perempuan.

¹²⁸Edy Yusuf Agunggunanto, *Strategi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengembangan Usaha Kebun Singkong Gajah di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur*, hlm 56.

- b. Kemudian dari kendala yang terjadi pada unit usaha simpan pinjam perempuan (SPP). Dari pihak pengelola dapat mengadakan Evaluasi setiap bulannya , dalam pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan pemerintah desa yang anggota desa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan BUMDesma Besuki apakah ada penunggakan atau tidaknya. Maka BUMDesma Besuki melakukan identifikasi masalah mengenai apa yang membuat dana atau pinjaman modal tersebut bisa mengalami penunggakan. Maka dari pihak pengelola mengadakan evaluasi kepada kelompok masyarakat yang terdapat anggotanya ada penunggakan pengembalian pinjaman.

Hal ini selaras dengan jurnal penelitian Puguh Budiono yang berjudul “Implementasi Kebijakan BUMDes di Bojonegoro” bahwa dalam mengatasi solusi mengadakan evaluasi dilaksanakan setiap pekan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pengurus BUMDes dan mencari solusi bersama, serta dengan evaluasi tersebut dapat diketahui perkembangan atau sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan. Selain evaluasi mingguan tersebut, evaluasi juga dilaksanakan setiap bulan dan juga setiap tahun melalui musyawarah desa yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Dalam mewujudkan kepatuhan pelaksana kebijakan dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksana kebijakan. Evaluasi dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengontrol dan mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan. Selain

evaluasi, untuk mewujudkan kepatuhan pelaksana dilakukan dengan pemecahan masalah bersama melalui musyawarah desa. Respon pemerintah desa dalam membantu pelaksana kebijakan melalui pemecahan-pemecahan masalah bersama yang dihadapi pelaksana. Evaluasi dan respon yang dilakukan oleh pemerintah desa bertujuan untuk menjamin transparansi dan pertanggungjawaban kebijakan oleh pelaksana.¹²⁹

¹²⁹ Puguh Budiono, *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Bersama di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)*, Vol.4, No.1, hlm 124.